

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2021-2026**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2021-2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Jember, Maret 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jember



**drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 198010272006041014

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	13
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	15
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	21
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>22</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	26
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	26
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	27
3.5 Penentuan isu-isu strategis	28
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>30</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>33</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANA</b>	<b>35</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>37</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>38</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20	
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	24
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	34
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	41
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	43
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	31
Gambar 4.2 Cascading	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Lingkungan Hidup.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Lingkungan Hidup harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
23. Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
24. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan

misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Kabupaten Jember meyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - b. Seksi Limbah B3;
  - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. Pelaksanaan penghimpunan dan pengoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;

- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dinas; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

#### **2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan telaah dan pelayanan informasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan**

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;

- o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, pengkoordinasian dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan, dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan.**

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan Tata Lingkungan;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- e) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

#### **2.1.3.1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan penginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Pelaksanaan Penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen RPPLH;
- c. Pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- h. Pelaksanaan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

- i. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan pembuangan limbah cair;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**2.1.3.2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan dinas terakait dalam hal pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e. Koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasn terkait dengan tugas dan fungsinya;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**2.1.3.3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

**mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan pembinaan penghargaan lingkungan hidup (Sekolah Adiwiyata, Desa Berseri, dll);
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka penghargaan Adipura;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan permukiman hijau;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam permukiman hijau; dan
- g. Pelaksananan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4 BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolan Sampah dan Limbah B3;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:

##### **2.1.4.1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan penyusunan informasi pengeloaan sampah tingkat kabupaten Jember;
- b. Pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Pelaksanan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;

- e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi bank sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendukung sarana dan prasarana dan pendukung kebersihan;
- h. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan pada fasilitas umum yang menjadi kewenangan daerah;
- j. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Akhir (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- k. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- l. Pelaksanaan pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**2.1.4.2) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten Jember
- b. Pelaksanaan perencanaan pengolahan pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- c. Pelaksanaan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengolahn, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpanan sementara, pengumpulan, pengolahan,

- pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**2.1.4.3) Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan pengelolaan tempat pemrosesan akhir;
- b. Pelaksanaan Pencatatan jumlah sampah yang masuk TPA;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penerangan gas);
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang TPA Kabupaten Jember);
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**2.1.5 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

#### **2.1.5.1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

##### **mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan di bidang pencemaran lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5.2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan**

##### **mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

- e. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis/terlantar;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.5.3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:**

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pengawasan perhutanan sosial;
- d. Pelaksanaan pembantuan kegiatan persemaian dan distribusi bibit penghijauan;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
- f. Pelaksanaan upaya imitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. Pelaksanaan inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) dan penyusunan profil emisi GRK;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman sumber daya alam lingkup kabupaten;
- j. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman sumber daya alam lingkup Kabupaten;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- l. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi, pelaporan terkait pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.**

**2.1.4.1 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan

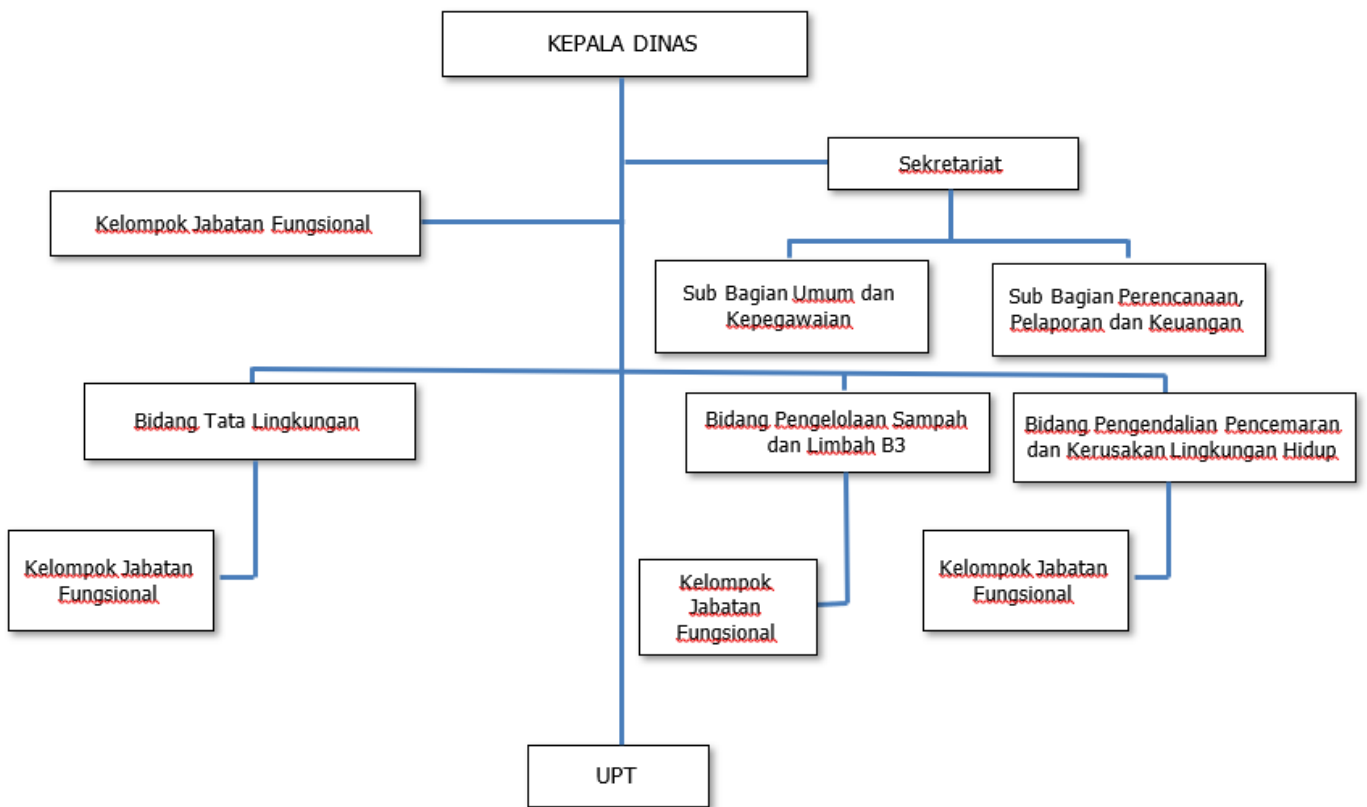
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
JEMBER**



**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

**2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebanyak 235 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 2 Orang
2. Eslon III : 3 Orang
3. Eslon IV : 4 Orang
4. Pejabat fungsional : 9 Orang
5. Staf/Non Eslon : 217 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 235 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1 Orang
2. Sarjana S-1 : 20 Orang
3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 68 Orang
5. SLTP : 29 Orang
6. SD : 116 Orang

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Dst.. ALAT KANTOR LAINNYA	300	33.000.000.000	Besi	-	-	-
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	33.000.000	HP Ink Tank 315	-	-	-
3	Lap Top	7	94.500.000	HP 240 G8	-	-	-
4	Lap Top	1	21.000.000	NB LENOVO FLEX 5 VIID	-	-	-

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, maka Dinas Lingkungan Hidup telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	% perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup				13%	24%	36%	56%	77%	-	-	-	-	-	13%	24%	36%	56%	77%
2	Jumlah kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti				10	15	35	50	70	10	5	11	12	13	-	-	-	-	-
3	Jumlah perusahaan yg membuat dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL				37	54	60	90	125	37	54	86	223	41	-	-	-	-	-
4	Jumlah kumulatif				37	51	80	110	145	58	60	62	44	49	-	-	-	-	-

	perusahaan yg taat menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi/ izin lingkungan																		
5	Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah B3				0	0	25	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah Rapat Koordinasi				0	40	40	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Perusahaan/ukm yang mendapat bantuan penyusunan dokumen UKL-UPL				-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH				-	100	125	125	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prosentase titik pemantauan				100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	sumber pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai																		
10	Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air				20	18 titik	18 titik	18 titik	18 titik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah analisis parameter kunci (BOD,COD,DO,TSS, Total Phospat,E.Coli, Total Coliform)				7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah alat pemantauan kualitas udara				-	-		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah orang yang mengikuti studi banding				-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah orang yang mengikuti diklat				-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah paket pengadaan alat laboratorium				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	Prosentase titik pemantauan sumber polusi yang memenuhi baku mutu air limbah bagi industri /kegiatan usaha lainnya						100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair				58	60	62	92	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jumlah perusahaan yang memiliki fasilitas Pengolahan Limbah Cair				10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Skor nilai SLHD				85,80	85,90	86,00	86,10	86,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah paket data Lingkungan yang diinformasikan				0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Jumlah buku SLHD				18,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi				0	0	0	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah jenis kerja sama informasi lingkungan dengan mass media				0	0	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah kerjasama informasi lingkungan dengan mass media untuk penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat				4	2	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Jumlah jenis kerja sama informasi lingkungan dengan mass media				4	2	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Prosentase titik pemantauan sumber polusi udara yang memenuhi baku mutu udara				-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ambien dan emisi sumber tidak bergerak																		
27	Jumlah titik pantau kualitas udara ambien				20	20	25	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak				5	20	30	42	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi pengendalian pencemaran				-	-	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim				0	0	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Jumlah data emisi gas rumah kaca yang berbasis geospasial				0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Jumlah masyarakat yang mengikuti				0	0	50	75	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	sosialisasi tentang perubahan iklim																		
33	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti aksi mitigasi perubahan iklim ( Program Kampung Iklim )				0	0	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Luas wilayah konservasi sumber daya air				4,8	2,4	4,0	5,2	5,6	5	2	4	0	0	-	-	-	-	-
35	Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi				4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Jumlah bibit tanaman yang ditanam di sumber mata air				3.000	1.750	2.500	3.250	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Jumlah data sumber mata air yang berbasis geospasial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Jumlah data lahan kritis yang berbasis geospasial				-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39	Luas kumulatif lahan yang dipantau status kerusakan tanah untuk produksi biomassa				-	-	0	200	300	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
40	Jumlah bibit tanaman kehutanan				200	0	0	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Luas lahan kritis yang terehabilitasi				0	0	0	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Jumlah luas lahan kritis yang sudah direhabilitasi				100	0	0	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata				1	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jumlah bantuan bibit tanaman kepada masyarakat				4.140	0	0	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Jumlah desa/kelurahan yang dibina				-	-	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	untuk program desa berseri																		
46	Jumlah kelompok yang dibina untuk program pelestarian lingkungan				-	-	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Jumlah Luas lahan yg ditanami tanaman porang dan obat2an				28	0	0	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Persentase luas lahan kritis yang terehabilitasi				11,19%	14,92 %	16,78%	0	0	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-
49	Jumlah bibit tanaman kehutanan				200	200	200	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Luas lahan kritis yang terehabilitasi				0	0	50	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Jumlah luas lahan kritis yang sudah direhabilitasi				100	100	100	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Jumlah pelaksanaan				1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	pengembangan kemitraan dan peran serta masyarakat																		
53	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata				1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Jumlah bantuan bibit tanaman kepada masyarakat				4.140	2.000	2.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Jumlah desa/kelurahan yang dibina untuk program desa berseri				-	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Jumlah kelompok yang dibina untuk program pelestarian lingkungan				-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	% peningkatan produksi hasil hutan rakyat				12%	0	16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Jumlah Luas lahan yg				28	30	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ditanami tanaman porang dan obat2an																		
59	% sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan				-	-	25%	50%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Jumlah lokasi sarana dan prasarana publik yg dibangun				-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
61	Presentase luasan RTH publik				2,75%	3%	4%	5%	7%	3%	3%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
62	Jumlah taman yang terpelihara				32	32	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Jumlah kawasan PKL yang ditata				4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Jumlah sarana prasarana olahraga ditaman publik				2	2	6	7	7	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
65	Jumlah kumulatif area taman publik dengan akses internet				1	3	6	9	12	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-

66	% sampah yang dikelola				80,00%	80%	84,00%	88%	92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Jumlah kumulatif ketersediaan TPST 3R dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat				0	3	6	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Peningkatan kelas/tipe TPA				1 control landfil 4 open dumping	TPA Balung control landfil	TPA Ambulu control landfil	TPA Tanggul control landfil	TPA Pakusari sanitary landfil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Jumlah Tempat Pengelolaan sampah yang memanfaatkan gas methan				-	-	-	-	TPA Pakusari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Persentase sampah tertangani				80%	80%	84%	88%	92%	85	87	88	88	88	-	-	-	-	-
71	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah				25 kec.	27 kec.	29 kec.	31 kec.	31 kec.	25	27	28	28	28	-	-	-	-	-
72	Jumlah penambahan armada arm roll				-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

73	Jumlah sarana pengelolaan sampah medis				-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Studi Banding pengelolaan sampah medis				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Pelatihan pengelolaan sampah medis				-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Jumlah pendirian bank sampah yang mengelola sampah rumah tangga				-	-	10	10	10	1	16	10	0	6	-	-	-	-	-
77	Jumlah masyarakat yg mengikuti pelatihan pembuatan bank sampah				0	0	150	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Skor nilai Adipura yang diperoleh				70,75	71	75	75	75	71	71	71	0	0	-	-	-	-	-
79	Jumlah Kampung Bersih Indah dan Nyaman				0	2	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80	% Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				25%	40%	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Skor nilai Adipura yang diperoleh				65	71	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Jumlah masyarakat yg mengikuti pelatihan pembuatan bank sampah				150	100	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jauh lebih kecil dari target karena pandemic Covid
- 2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jauh lebih kecil dari target karena pandemic Covid
- 3) Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM
- 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang artinya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember sangat baik yaitu dengan indeks 75,08
- 5) Luas wilayah konservasi sumber daya air (Ha) dalam 2 tahun terakhir tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM
- 6) Persentase upaya konservasi dan perlindungan pada sumber-sumber mata air (%)2 tahun terakhir tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM
- 7) Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Skor Adipura), belum bisa dilaksanakan dikarenakan salah satu syarat penilaian Adipura yaitu Dokumen Jakstrada belum lengkap sehingga belum bisa dijadikan syarat;
- 8) Jumlah pengaduan masyarakat akibatadanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (buah), dari jumlah pengaduan yang diterima ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup
- 9) Jumlah Bank Sampah yang mengelola sampah rumah tangga (Bank Sampah), masih terbatasnya pembentukan bank sampah di kabupaten Jember

- 10) Persentase sampah terangkut per hari (%), jumlah prosentase tetap dikarenakan jumlah armada angkut sampah terbatas dan banyak mengalami kerusakan.
- 11) Jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah pada tahun 2020 sebanyak 29 kecamatan
- 12) Jumlah ketersediaan TPS dan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah) hingga tahun 2020 sebanyak 12 unit, pada tahun-tahun berikutnya perlu penambahan ketersediaan TPS sebagai tempat fasilitas olah pilah sampah sebelum diangkut ke TPA, agar jumlah sampah yang masuk TPA tidak banyak.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah</b>																	
v PAD	95000000	95000000	95000000	83500000	95000000	167297000	167684000	229117000	170065000	178035000	176,10	176,51	241,18	203,67	187,41		
v Dana Perimbangan / Transfer																	
v Lain lain Pendapatan yang sah																	
<b>Total Pendapatan</b>	95000000	95000000	95000000	83500000	95000000	167297000	167684000	229117000	170065000	178035000	176,10	176,51	241,18	203,67	187,41		

Belanja Daerah/Perangkat Daerah	230762555 61	286339551 33	27796616 094	25427772 094	36385373 510	230762555 61	286339551 33	277966160 94	254277720 94	337636632 05							
<b>Belanja Tdk Langsung</b>	141947090 3	162753931 33	23313128 094	19898478 094		134642304 0	150340415 40	183413856 37	144372540 79		94,85	92,37	78,67	72,55			

Dari table diatas dapat disajikan pagu anggaran pada tiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dikarenakan kebijakan administrasi sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan selainya itu pada dampak covid 19 berpengaruh sangat besar pada pelaksanaan kegiatan karena penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan kegiatan hanya bisa dilakukan daring (online) ataupun mengurangi target yang dikerjakan Pelayanan perangkat daerah dilakukan melakukan online maupun pembatasan pelayanan sesuai protokol Kesehatan.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatam

- 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia dan sarana, yang masih bias dioptimalkan dalam menunjang kegiatan yang dilaksanakan dinas lingkungan hidup
- 2) Terpantaunya Kualitas Air Badan Air dan Kualitas Udara Ambien secara berkala dan representative
- 3) Tersedianya pengangkut sampah, TPS dan TPA dan rencana pembangunan TPST 3R skala kota
- 4) Meningkatnya sekolah peduli lingkungan dan kampung yang menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

#### b. Kelemahan

- 1) Masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia pada setiap bidang
- 2) Belum adanya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang
- 3) Kurangnya personil pejabat pengawas lingkungan dan pengendali dampak lingkungan
- 4) Belum optimalnya managemen SDM bidang pengelolaan sampah
- 5) Belum tersedianya SDM dan sarana prasarana pada Laboratorium Lingkungan Hidup

### 2. Faktor Eksternal

#### a. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang Lingkungan Hidup
- 2) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.

- 3) Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup
- 4) Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
- 5) Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup

b. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3) Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan eksploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim
- 4) Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Lingkungan Hidup. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kelestarian air sungai 2. Kurangnya upaya peningkatan kesadaran melalui Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/

			<p>Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <p>3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan utamanya di bantaran sungai</p> <p>4. Rendahnya Kesadaran pengusaha bidang industri dan masyarakat umum terhadap pengelolaan limbah cair</p>
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	<p>1. Kurangnya pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik dan lainnya yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (udara)</p> <p>2. Kesadaran pengusaha bidang industri dan masyarakat umum emisi gas buangan rendah</p> <p>3. Tingkat buangan gas emisi kendaraan bermotor cukup tinggi</p> <p>4. Kurangnya petugas pemantau lingkungan hidup</p> <p>5. Kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	<p>1. Kurangnya informasi luasan tutupan lahan sebenarnya yang meliputi Ruang</p>

			<p>Terbuka Hijau, hutan dan luasan lahan hijau lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kurangnya kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air</li> <li>3. Belum tersedianya data pemetaan lokasi lahan kritis</li> </ol>
		Rendahnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Belum adanya PERDA perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program kampung iklim (ProKlim)</li> <li>2. Perlu adanya koordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk mendukung pelaksanaan program kampung iklim</li> <li>3. Belum tersusunnya RAD tentang Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim dan RAD Gas Rumah Kaca</li> </ol>
		Kurangnya sinkronisasi kebijakan Perhutanan Sosial	Belum adanya koordinasi dengan pihak yang terkait dan kelompok masyarakat sekitar hutan
2	Pengelolaan sampah	Belum optimalnya penanganan sampah dan pengurangan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya armada sampah</li> <li>2. Minimnya luasan lahan TPA</li> <li>3. Terbatasnya jumlah TPST3R</li> <li>4. Tidak adanya sanksi tegas dalam pembuangan sampah sembarangan</li> <li>5. Belum optimalnya</li> </ol>

			<p>edukasi tentang pendidikan dasar pengelolaan/ pembuangan sampah</p> <p>6. Belum adanya PERDA tentang pengelolaan sampah</p> <p>7. Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan Sampah belum lengkap sehingga tidak bisa menjadi acuan penyusunan program pengelolaan sampah tiap tahunnya</p>
		Belum optimalnya sistem olah pilah sampah hingga ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	<p>1. Masih minimnya Fasilitas pengelolaan sampah (mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga tempat pemrosesan akhir</p> <p>2. Terbatasnya tenaga/ petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPST3R</p> <p>3. Belum tersedianya Pemetaan fasilitas Pengelolaan Sampah</p> <p>4. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di tingkat rumah tangga tentang pemilahan sampah</p>
		Kurang optimalnya pengelolaan limbah Covid -19	<p>1. Meningkatnya jumlah pemakaian masker, face shield, sarung tangan sekali pakai di masyarakat</p> <p>2. Belum tersedianya</p>

			<p>sarana prasarana khusus untuk pengumpulan bekas APD di masyarakat</p> <p>3. Belum tersedianya sarana prasarana seperti incinerator khusus limbah covid yang dapat mendestruksi pathogen/virus menular dan berbahaya</p>
		Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember	<p>1. Kurangnya sosialisasi tentang Bank Sampah</p> <p>2. Kurangnya tenaga pendamping masyarakat yang memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya pembentukan Bank Sampah</p> <p>3. Belum optimalnya pengintegrasian bank sampah dengan sektor informal</p> <p>4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah</p>
3	Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pencegahan pencemaran air	<p>1. Masih adanya usaha dan atau kegiatan yang tidak menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air</p> <p>2. Kurangnya tenaga pengawas dan pengendali dampak lingkungan</p>

		Belum optimalnya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran perusahaan dalam upaya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (hanya beberapa perusahaan yang memiliki cerobong asap)</li> <li>2. Kurangnya tenaga pengawas dan pengendali dampak lingkungan</li> </ol>
		Tidak tersedianya informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya informasi dan data Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan/atau diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa, disebabkan Kegiatan Pemantauan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa tidak dilaksanakan</li> <li>2. Tidak adanya tenaga/petugas yang kompeten pada kegiatan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa</li> </ol>
		Belum optimalnya Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya SOP tentang pengaduan masyarakat</li> <li>2. Kurangnya tenaga pengawas dan pengendali dampak lingkungan</li> </ol>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP  
PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM  
MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

**Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

**Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang proaktif dan kolaboratif.

**Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*).

**Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.**

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing*

*business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

**Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

**Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

**Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 Tujuan ke 3 dan Sasaran ke 1, sasaran ke 2 dan sasaran ke 3 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 4	<p>a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember setiap tahun;</p> <p>b. Adanya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan Lingkungan Hidup;</p> <p>c. Adanya Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah;</p> <p>d. Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta</p>	<p>a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan;</p> <p>c. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai;</p> <p>d. Kurangnya jumlah SDM yang</p>

		<p>berbagai sektor instansi terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>e. Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan uji kualitas udara ambien dan uji kualitas air badan air;</p> <p>f. Adanya sarana prasarana tempat transit sampah TPS3R 2 lokasi, TPS 21 Lokasi dan Transfer Depo 16 lokasi dan adanya armada pengangkut sampah sebanyak 34 armada;</p> <p>g. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Lingkungan Hidup;</p> <p>h. Adanya dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup;</p> <p>i. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana</p>	<p>berkompeten dalam pengawasan dan pengendali dampak lingkungan;</p> <p>e. Masih belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);</p> <p>f. Masih belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;</p> <p>g. Penanganan sampah belum optimal, sebagian besar selama ini berlangsung</p>
--	--	--	--

		<p>dan prasarana bidang Lingkungan Hidup;</p>	<p>secara tradisional kumpul-angkut-buang</p> <p>h. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan;</p> <p>i. Masih terbatasnya jumlah bank sampah di Kabupaten Jember</p> <p>j. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;</p>
--	--	---	---

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	Pemantauan Kualitas Air dan Udara Secara berkala	Masih belum dilaksanakan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan  Belum Adanya Dokumen RAD Gas Rumah Kaca
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional	Sudah mempunyai dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Kewenangan Urusan Kehutanan menurut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berada di Provinsi
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Peraturan Bupati Jember Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Susunan	Belum adanya kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

		Organisasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki Tugas Fungsi yang salah satunya yaitu Melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan pengawasan perhutanan social	
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Kurangnya kapasitas SDM dalam tata kelola Lingkungan Hidup	Beberapa SDM memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan	Kesadaran masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan limbah yang dihasilkan masih rendah sehingga terjadi pencemaran air dan Tingginya alih fungsi lahan terutama lahan produktif di wilayah tangkapan air yang dijadikan perumahan, dan lahan tanaman semusim	Pemantauan Kualitas Air dan Udara yang dilakukan berkala setiap tahun.	Belum optimalnya partisipasi/pelibatan masyarakat yang bermukim disekitar hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) didalam upaya pengerlindungan sumber daya air  Kurangnya kualitas dan jumlah SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait didalam pelaksanaan kegiatan penghijauan/konservasi lahan kritis.
Meningkatnya Kualitas Udara	Belum optimalnya pengendalian	Pemantauan Kualitas	Belum optimalnya

Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	pencemaran dan kerusakan lingkungan	Udara Ambient secara berkala	Koordinasi dan pengawasan dengan pihak terkait utamanya terhadap usaha maupun kendaraan bermotor pada emisi udara yang dihasilkan
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah;</li> <li>b. Pengelolaan TPA yang belum optimal</li> <li>c. Belum optimalnya pengawasan usaha</li> </ul>	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Belum optimalnya partisipasi/pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah</p> <p>Jumlah SDM PPLHD belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang menjadi wewenang Kabupaten Jember didalam pembinaan dan pengawasan</p>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas internal dan lintas sektoral terkait didalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek	Sudah mempunyai dokumen akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara berkala	Belum optimalnya data yang di olah dalam laporan perencanaan akuntabilitas kinerja

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah **“Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan dan sebagian urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW**

No .	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan pengelolaan Sampah	Adanya target timbulan sampah yang ditangani dan cakupan area pelayanan Adanya komunitas peduli sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala rumah tangga, sehingga pada beberapa lokasi dibutuhkan TPS sebagai sarana olah pilah sampah
2	Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Adanya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Masih rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat terhadap Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan yang

			mengurangi daya dukung dan daya tampung serta merubah eksosistem
3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Adanya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di dalamnya termasuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan	Masih Kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas air, udara dan lahan utamanya kualitas air yaitu pada sempadan sungai untuk tidak membuang sampah di sungai untuk menjaga kualitas air
4	Rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber mata air	Adanya target penanaman bibit tanaman pada lahan kritis	Belum tersedianya data lahan kritis yang rusak
5	Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan kegiatan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air	Adanya target dan perencanaan penanaman bibit tanaman pada lokasi sumber mata air dan pembangunan sipil teknis untuk perlindungan sumber mata air	Belum tersedianya data sumber mata air yang rusak

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sistem jaringan prasarana lingkungan diantaranya Prasarana pengelolaan sampah yang merupakan Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip 4 R yaitu mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang (recycle) dan mengganti kembali (replaced) meliputi :

1. Rencana lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
2. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS); dan
3. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
4. Rencana lokasi TPA berupa optimalisasi TPA, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Diizinkan pemanfaatan kawasan untuk jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam, serta arahan peraturan zonasi kawasan sekitar mata air dan diwajibkan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka Panjang.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Pemantauan kualitas air secara berkala pada air sungai	Belum optimalnya partisipasi/pelibatan masyarakat yang bermukim disekitar hulu

			dan Daerah Aliran Sungai (DAS) didalam upaya pengerlindungan sumber daya air
2.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Pengangkutan sampah yang rutin dilaksanakan setiap hari	Masih kurangnya jumlah armada operasional pengangkut sampah
3.	Jumlah limbah B3 yang diolah Sesuai peraturan perundang-undangan	Dilakukan pengawasan pada usaha	Jumlah SDM PPLHD belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang menjadi wewenang Kabupaten Jember didalam pembinaan dan pengawasan
	Jumlah timbulan Sampah yang Didaur ulang	Proses daur ulang dilaksanakan di tiap TPS/TPST maupun bank sampah	Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam proses daur ulang sampah
	Lahan kritis yang direhabilitasi	Adanya target penanaman bibit tanaman pada lahan kritis	Belum tersedianya data lahan kritis yang rusak

Pembangunan di Kabupaten Jember tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember, dengan nilai IKLH pada tahun 2020 sebesar 75,08
2. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
3. Belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;
4. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember;
5. Belum ada hukum secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
6. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);
9. Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kualifikasi di bidang lingkungan;

11. Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan;
12. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok dan masyarakat sekitar hutan;
13. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim;
14. Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember yang dapat berfungsi sebagai circular economy.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH I JEMBER (WES WAYAHE MBENAH I JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER** dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Misi ke-4 yakni **“Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.”**

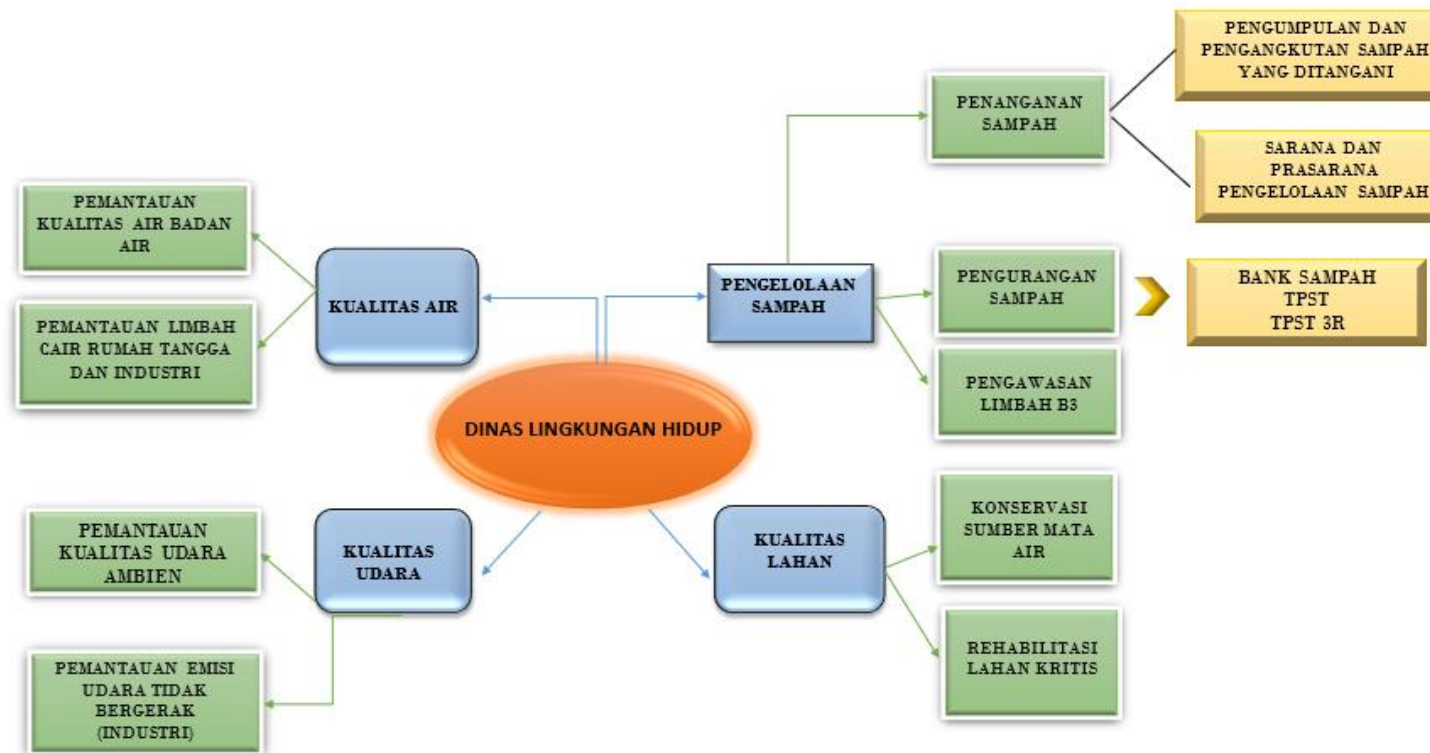
Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**

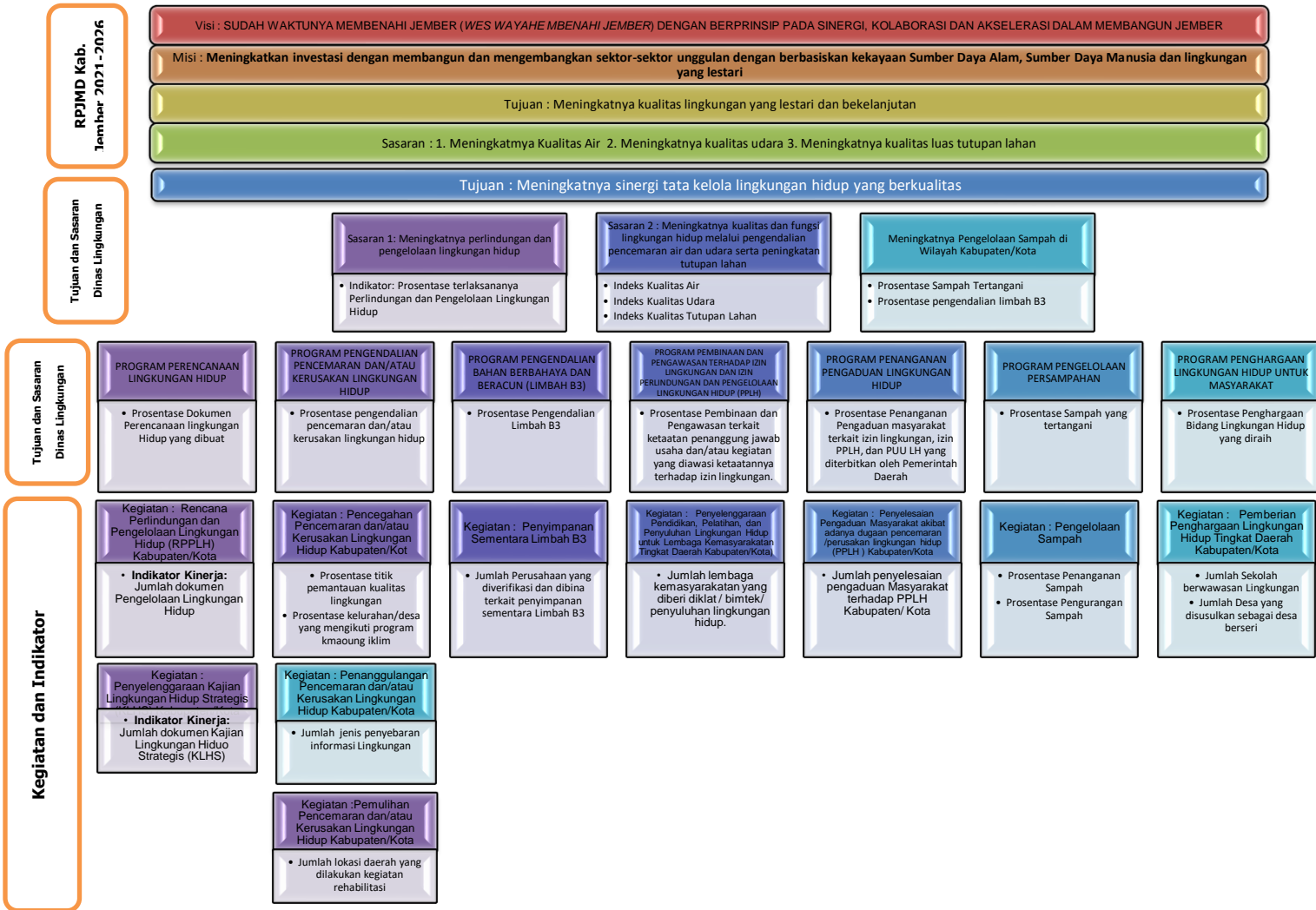
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
	Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	62,78	63,03				
		1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	75 %	80 %				
		2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,39	53,49				
			2. Indeks Kualitas Udara (Indeks)	77,11	77,20				
			3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	52,38	53,21				
		3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Sampah yang tertangani (%)	90,46	90,56				
			2. Prosentase pengendalian limbah b3	100 %	100 %				
<b>Setelah Perubahan</b>									

	Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			80%	85%	90%	95%
		2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			0,141	0,142	0,143	0,144
		3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Sampah yang tertangani			92%	93%	95%	96%
			2. Prosentase Pengendalian Limbah B3			100%	100%	100%	100%

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



**Gambar 4.2 Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember**



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

VISI: "SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER ( <i>WES WAYAHE MBENAH JEMBER</i> ) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"			
MISI I: Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	1. Penguatan proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan pada perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup peta peraturan perundang-undangan dalam kerangka regulasi serta pengawasan dan penindakan yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran peraturan 2. Pengarusutamaan

		<p>pendidikan warga pendidikan, masyarakat dan lembaga masyarakat peduli lingkungan</p> <p>3. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasamadalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>
<p>2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkunganhidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan</p>	<p>1. Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan</p>	<p>1. Pemantauan terhadap sumber-sumber pencemardari industri, domestik, dan lainnya, yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (air dan udara);</p> <p>2. Rehabilitasidan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air</p> <p>3. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat</p> <p>4. Implementasikebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pad atingkat daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim)</p>
<p>3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Peningkatan penanganan dan pengurangan sampah secara terintegrasi</p>	<p>1. Penanganan sampah dan pengurangan sampah dengan sistem olah pilah sampah dari hulu sampai TPA</p> <p>2. Modernisasi sarana dan prasanapengelolaan sampah dari armada pengangkut sampah, olah pilah sampah, hingga sarana prasana pemrosesan sampah</p> <p>3. Penguatan pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai circular economy</p>
<p>4. Meningkatnya Penyimpanan Limbah B3 di Wilayah Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Peningkatan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>	<p>1. Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Sebelum Perubahan</b>																			
Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100%	100%	18,654,018,328	100%	16,847,338,328	100%	16,786,618,328	100%	16,769,018,328	100%	16,705,525,328	100%	85,762,518,640	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas aparatur dan Pelayanan publik			Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%	100%	18,654,018,328	100%	16,847,338,328	100%	16,786,618,328	100%	16,769,018,328	100%	16,705,525,328	100%	85,762,518,640	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		100%	18,654,018,328	100%	16,847,338,328	100%	16,786,618,328	100%	16,769,018,328	100%	16,705,525,328	100%	85,762,518,640	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun	15 Dok	15 Dok	165,000,000	15 Dok	165000000	15 Dok	165000000	15 Dok	165000000	15 Dok	165000000	75 Dok	825,000,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 paket	4 Dok	35,000,00 0	4 Dok	35,000,00 0	4 Dok	35,000,00 0	4 Dok	35,000,00 0	4 Dok	35,000,00 0	20 Dok	175,000,00 0	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.01.2 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	-	2 Dok	20,000,00 0	2 Dok	20,000,00 0	2 Dok	20,000,00 0	2 Dok	20,000,00 0	2 Dok	20,000,00 0	10 Dok	100,000,00 0	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.01.2 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	-	2 Dok	15,000,00 0	2 Dok	15,000,00 0	2 Dok	15,000,00 0	2 Dok	15,000,00 0	2 Dok	15,000,00 0	10 Dok	75,000,000	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.01.2 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	-	2 Dok	35,000,00 0	2 Dok	35,000,00 0	2 Dok	35,000,00 0	2 Dok	35,000,00 0	2 Dok	35,000,00 0	10 Dok	175,000,00 0	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.01.2 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	-	2 Dok	30,000,00 0	2 Dok	30,000,00 0	2 Dok	30,000,00 0	2 Dok	30,000,00 0	2 Dok	30,000,00 0	10 Dok	150,000,00 0	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.01.2 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	-	3 Dok	30,000,00 0	3 Dok	30,000,00 0	3 Dok	30,000,00 0	3 Dok	30,000,00 0	3 Dok	30,000,00 0	15 dok	150,000,00 0	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkung an Hidup

		2.11.01.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	14,493,92 5,328	100%	14,493,92 5,328	100%	14,493,92 5,328	100%	14,493,92 5,328	100%	14,493,92 5,328	100%	72,469,626, 640	Sekretari s Dinas	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan x 281 Orang	281 Orang	14,457,92 5,328	281 Orang	14,457,92 5,328	281 Orang	14,457,92 5,328	281 Orang	14,457,92 5,328	281 Orang	14,457,92 5,328	1405 orang	72,289,626, 640	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan yang diverifikasi	12 Dok	2 Dok	16,000,00 0	2 Dok	16,000,00 0	2 Dok	16,000,00 0	2 Dok	16,000,00 0	2 Dok	16,000,00 0	10 Dok	80,000,000	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	5 Jenis	20,000,00 0	5 Jenis	20,000,00 0	5 Jenis	20,000,00 0	5 Jenis	20,000,00 0	5 Jenis	20,000,00 0	25 Jenis	100,000,00 0	Sub Bagian Perencana a, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diawasi	-	4	10,000,00 0	4	10,000,00 0	4	10,000,00 0	4	10,000,00 0	4	10,000,00 0	20	50,000,000	Sekretari s Dinas	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik daerah yang disusun	-	4 lapora n	10,000,00 0	4 lapora n	10,000,00 0	4 lapora n	10,000,00 0	4 lapora n	10,000,00 0	4 lapora n	10,000,00 0	20 lapora n	50,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang ada	-	867 Orang	388,500,0 00	867 Orang	388,500,0 00	867 Orang	393,500,0 00	867 Orang	451,100,0 00	867 Orang	451,100,0 00	4335 Orang	2,072,700,0 00	Sekretari s Dinas	Dinas Lingkun gan Hidup

		2.11.01.2 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas, Batik dan Olahraga	-	576 Orang	230,400,0 00	576 Orang	230,400,0 00	576 Orang	230,400,0 00	576 Orang	288,000,0 00	576 Orang	288,000,0 00	2880	1,267,200,0 00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	10 Dok	30,000,00 0	10 Dok	30,000,00 0	10 Dok	35,000,00 0	10 Dok	35,000,00 0	10 Dok	35,000,00 0	50 dok	165,000,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah orang penilaian Kinerja Pegawai	-	281 Orang	28,100,00 0	281 Orang	28,100,00 0	281 Orang	28,100,00 0	281 Orang	28,100,00 0	281 Orang	28,100,00 0	1405 orang	140,500,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang berkompeten untuk mengikuti diklat	-	10 Orang	100,000,0 00	10 Orang	100,000,0 00	10 Orang	100,000,0 00	10 Orang	100,000,0 00	10 Orang	100,000,0 00	50 orang	500,000,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06	Administrasi umum perangkat daerah	Jenis sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi		108	634,000,0 00	108	634,000,0 00	108	637,000,0 00	108	663,500,0 00	108	693,500,0 00	540	3,262,000,0 00	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	8,500,000	12 Bulan	8,500,000	60 Bulan	38,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	12 Bulan	98,000,00 0	12 Bulan	98,000,00 0	12 Bulan	98,000,00 0	12 Bulan	10000000 0	12 Bulan	10000000 0	60 Bulan	494,000,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	-	12 Bulan	12,000,00 0	12 Bulan	12,000,00 0	12 Bulan	12,000,00 0	12 Bulan	15,000,00 0	12 Bulan	15,000,00 0	60 bulan	66,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah bulan tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	12 bulan	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,000,000	60 bulan	30,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
				2. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	12 bulan	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	60 bulan	150,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	12 Bulan	16,000,000	12 Bulan	16,000,000	12 Bulan	16,000,000	12 Bulan	16,000,000	12 Bulan	16,000,000	60 bulan	80,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	18,000,000	60 bulan	84,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	6	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	270,000,000	12 Bulan	300,000,000	60 bulan	1,320,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	7	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	60 bulan	1,000,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang yang terpenuhi		19	35,000,000	19	535,000,000	19	735,000,000	19	785,000,000	19	885,000,000	95	2,975,000,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur	-	18	35,000,000	18	35,000,000	18	35,000,000	18	35,000,000	18	35,000,000	90	175,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	0	1	500,000,000	1	700,000,000	1	750,000,000	1	850,000,000	5	2,800,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penunjang administrasi yang tepenuhi		60	2,611,600,000	60	15,700,000	60	16,200,000	60	19,500,000	60	22,500,000	240	2,685,500,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12	12	2,600,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,500,000	12	3,500,000	60	2,613,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa telepon dan internet	12	12	1,000,000	12	1,200,000	12	1,200,000	12	1,500,000	12	2,000,000	60	6,900,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	12	8,600,000	12	9,500,000	12	10,000,000	12	12,500,000	12	15,000,000	60	55,600,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
				2. Jumlah orang untuk memenuhinya tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	24	24	2,000,000	24	2,000,000	24	2,000,000	24	2,000,000	24	2,000,000	60	10,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan		168	315,993,000	178	605,213,000	186	335,993,000	196	345,993,000	206	355,993,000	934	1,959,185,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	12	40	10,000,000	50	15,000,000	60	20,000,000	70	25,000,000	80	30,000,000	300	100,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup

			Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan														Kepegawaian	
		2.11.01.2 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112	112	225,993,000	112	225,993,000	112	225,993,000	112	225,993,000	112	225,993,000	560	1,129,965,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit pembayaran biaya Perizinan Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan mesin lainnya (Printer, laptop, komputer)	12	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000	12	50,000,000	60	200,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	250,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	1	-	1	139,610,000	-	-	-	-	-	-	2	139,610,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup

			atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya															
		2.11.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	-	1	139,610,000	-	-	-	-	-	-	2	139,610,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100%	100%	32,016,786,900	100%	70,403,858,250	100%	88,294,343,100	100%	74,379,867,950	100%	73,235,392,800	100%	338,330,249,000	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		75%	1,820,078,000	80%	2,070,078,000	85%	1,800,078,000	90%	1,920,078,000	95%	1,920,078,000	95%	9,530,390,000	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat		100%	1,820,078,000	100%	2,070,078,000	100%	1,800,078,000	100%	1,920,078,000	100%	1,920,078,000	100%	9,530,390,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.201	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup		2	320,078,000	3	470,078,000	2	200,078,000	2	320,078,000	2	320,078,000	11	1,630,390,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.201.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD	7	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	5	480,000,000	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak	Dinas Lingkungan Hidup

																		Lingkung an	
				Jumlah Dokumen D3TLH Berbasis Ekosistem	-	1	200,078,0 00	1	200,078,0 00	1	200,078,0 00	1	200,078,0 00	1	200,078,0 00	5	1,000,390,0 00	Seksi Perencan aan dan Kajian Dampak Lingkung an	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah Dokumen RPPLH	-	-	-	1	150,000,0 00	-	-	-	-	-	-	1	150,000,00 0	Seksi Perencan aan dan Kajian Dampak Lingkung an	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.02.2 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		7 dok	1,500,000, 000	10 dok	1,600,000, 000	9 dok	1,600,000, 000	9 dok	1,600,000, 000	8 dok	1,600,000, 000	43 dok	7,900,000,0 00	Bidang Tata Lingkung an	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.02.2 02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember	-	1	500,000,0 00	1	500,000,0 00	1	500,000,0 00	1	500,000,0 00	1	500,000,0 00	5	2,500,000,0 00	Seksi Perencan aan dan Kajian Dampak Lingkung an	Dinas Lingkung an Hidup
				Kegiatan penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Jember	-	5	500,000,0 00	7	500,000,0 00	6	500,000,0 00	6	500,000,0 00	5	500,000,0 00	32	2,500,000,0 00	Seksi Perencan aan dan Kajian Dampak Lingkung an	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.02.2 02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen penyusunan KLHS Rencana	-	1	500,000,0 00	1	500,000,0 00	1	500,000,0 00	1	50000000 0	1	500,000,0 00	5	2,500,000,0 00	Seksi Perencan aan dan	Dinas Lingkung an Hidup

			KLHS RPJPD/RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember														Kajian Dampak Lingkungan	
		2.11.02.2 02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	-	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan			1. Indeks Kualitas Air		53,49	922000000	53,59	1,172,000,000	53,69	2597000000	53,79	2,606,000,000	53,89	2,571,000,000	53,89	9,868,000,000		
				2. Indeks Kualitas Udara		77,20	922000000	77,29	1,172,000,000	77,39	2597000000	77,49	2,606,000,000	77,59	2,571,000,000	77,59	9,868,000,000		
				3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan		53,21	922,000,000	54,04	1,172,000,000	54,87	2,597,000,000	55,70	2,606,000,000	56,53	2,571,000,000	56,53	9,868,000,000		
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		100%	922,000,000	100%	1,172,000,000	100%	2,597,000,000	100%	2,606,000,000	100%	2,571,000,000	100%	9,868,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.03.2 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan															Dinas Lingkung an Hidup
				Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim pada tahun berjalan		100%	642,000,0 00	100%	677,000,0 00	100%	1,937,000, 000	100%	1,881,000, 000	100%	1,781,000, 000	100%	6,918,000,0 00	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.03.2 01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air		18	36,000,00 0	20	40,000,00 0	20	40,000,00 0	25	50,000,00 0	25	50,000,00 0	108	216,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair		40	80,000,00 0	40	80,000,00 0	40	80,000,00 0	50	100,000,0 00	50	100,000,0 00	220	440,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah titik pantau kualitas udara ambien		10	30,000,00 0	12	36,000,00 0	12	36,000,00 0	14	42.000.00 0	14	42.000.00 0	62	102,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n	Dinas Lingkung an Hidup

																	Lingkung an Hldup		
				Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak		30	96,000,00 0	30	96,000,00 0	30	96,000,00 0	30	96,000,00 0	150	480,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup		
				Luas lahan yang dipantau status kerusakan tanah untuk produksi biomassa		100	75,000,00 0	100	75,000,00 0	100	75,000,00 0	100	75,000,00 0	500	375,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup		
				Jumlah titik pantau kualitas air laut		5	50,000,00 0	5	50,000,00 0	6	60,000,00 0	6	60,000,00 0	28	280,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup		
		2.11.03.2 01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim		2	75,000,00 0	2	75,000,00 0	3	100,000,0 00	3	100,000,0 00	4	100,000,0 00	14	450,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup

				Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang adaptasi & mitigasi perubahan iklim		150		150		200		200		200			Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah orang yang mengikuti studi banding ke lokasi pemenang proklamasi lestari		20	50,000,000	30	75,000,000	30	75,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	160	400,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah jenis bantuan sarana dan prasarana di kampung iklim		2	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	18	450,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Pemetaan pengurangan emisi gas rumah kaca secara geospasial								1	100,000,000			1	100,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.03.2 01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti studi banding laboratorium lingkungan		10	50,000,00 0									10	50,000,000	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah orang yang mengikuti diklat		2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	4	100,000,0 00	4	100,000,0 00	14	350,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Pembangunan gedung laboratorium lingkungan		-	-	-	-	1	1,225,000, 000	0	-	0	-	1	1,225,000,0 00	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah paket pengadaan alat laboratorium		-	-	-	-	-	-	1	1,000,000, 000	1	1,000,000, 000	2	2,000,000,0 00	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup

		2.11.03.2 02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan		92	80,000,00 0	128	145,000,00	291	160,000,00	198	175,000,00	233	190,000,00	814	750,000,00	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
		2.11.03.2 02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui baliho	1	40	10,000,00 0	50	15,000,00 0	60	20,000,00 0	70	25,000,00 0	80	30,000,00 0	300	100,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui iklan media	1	2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	10	250,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah jenis penyebaran informasi lingkungan bagi masyarakat melalui website	1	0	-	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	4	200,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lingkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup

				Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengendalian pencemaran	20	50	20,000,000	75	30,000,000	100	40,000,000	125	50,000,000	150	60,000,000	500	200,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.203	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daerah yang dilakukan kegiatan rehabilitasi		7	200,000,000	9	350,000,000	11	500,000,000	13	550,000,000	13	600,000,000	53	2,200,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.203.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi		2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	14	225,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah bibit tanaman yang mampu menyimpan air ditanam di sekitar sumber mata air		1000	25,000,000	1000	25,000,000	1000	25,000,000	3000	75,000,000	3000	75,000,000	9000	225,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah lokasi pembangunan sipil teknis untuk perlindungan sumber mata air		1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	11	550,000,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan	Dinas Lingkungan Hidup

																			Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Pemetaan lokasi sumber mata air secara geospasial				1	100,000,000							1	100,000,000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah lokasi lahan yg ditanami tanaman produktif di sekitar hutan		-		1	25,000,000	1	25,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	6	150,000,000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah bibit tanaman produktif untuk masyarakat sekitar hutan		-		1000	25,000,000	1000	25,000,000	2000	50,000,000	2000	50,000,000	6000	150,000,000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah lokasi lahan kritis yg direhabilitasi		2	25,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	225,000,000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Dinas Lingkungan Hidup

																		Lingkung an Hldup	
				Jumlah bibit tanaman di lahan kritis		1000	25,000,00 0	1000		1000		1000		2000	50,000,00 0	6000	75,000,000	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah lokasi pantai yang direhabilitasi		2	25,000,00 0	2	25,000,00 0	2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	2	50,000,00 0	10	200,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Jumlah bibit tanaman di pantai		1000	25,000,00 0	1000	25,000,00 0	2000	50,000,00 0	2000	50,000,00 0	3000	50,000,00 0	9000	200,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup
				Pemetaan lokasi lahan kritis secara geospasial						1	100,000,0 00					1	100,000,00 0	Bidang Pengenda llan Pencemar an dan Kerusaka n Lngkung an Hldup	Dinas Lingkung an Hidup

	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di			1. Prosentase Sampah yang tertangani		91%	81.000.000	92%	89.000.000	93%	105.000.000	94%	117.000.000	95%	168.000.000	95%	560,000,000		
	Wilayah Kabupaten/Kota			2. Prosentase pengendalian limbah b3		100%	81.000.000	100%	89.000.000	100%	105.000.000	100%	117.000.000	100%	168.000.000	100%	560,000,000		
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Pengendalian Limbah B3		100	81.000.000	100	89.000.000	100	105.000.000	100	117.000.000	100	168.000.000	100%	560,000,000	Bidang Pengelolan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.201	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3		50	81.000.000	55	89.000.000	70	105.000.000	85	117.000.000	100	168.000.000	360	560,000,000	Bidang Pengelolan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.201.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang diverifikasi dan dibina terkait penyimpanan sementara limbah B3	34	50	81.000.000	55	89.000.000	70	105.000.000	85	117.000.000	100	168.000.000	360	560,000,000	Bidang Pengelolan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	95%	100.000.000	95%	500,000,000		Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.201	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	180	500,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.201.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	150	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	180	500,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

				Daerah Kabupaten/Kota															
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		75%	100,000,0 00	80%	100,000,0 00	85%	100,000,0 00	90%	100,000,0 00	95%	100,000,0 00	95%	500,000,00 0		Dinas Lingkun an Hidup
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT	Prosentase Lembaga Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		100%	100,000,0 00	100%	100,000,0 00	100%	100,000,0 00	100%	100,000,0 00	100%	100,000,0 00	100%	500,000,00 0	Bidang Tata Lingkun gan	Dinas Lingkun an Hidup
		2.11.08.2 01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat / bimtek/ penyuluhan lingkungan hidup		1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	5	500,000,00 0	Bidang Tata Lingkun gan	Dinas Lingkun an Hidup
		2.11.08.2 01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah diklat / bimtek / penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	-	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	5	500,000,00 0	Bidang Tata Lingkun gan	Dinas Lingkun an Hidup

	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		75%	525,000,000	80%	800,000,000	85%	825,000,000	90%	825,000,000	95%	850,000,000	95%	3,825,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih		80%	525,000,000	80%	800,000,000	80%	825,000,000	80%	825,000,000	80%	850,000,000	80%	3,825,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09.201	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan		7	525,000,000	10	800,000,000	12	825,000,000	15	825,000,000	20	850,000,000	64	3,825,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah Desa yang diusulkan sebagai desa berseri		3	525,000,000	4	800,000,000	5	825,000,000	6	825,000,000	7	850,000,000	25	3,825,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09.201.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata;	1	20	300000000	25	350000000	30	375000000	32	375000000	40	400000000	147	1,800,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah desa/kelurahan yang dibina untuk program desa berseri; dan program kampung bersih, indah dan nyaman	2	5	125000000	10	250000000	15	250000000	20	250000000	25	250000000	75	1,125,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah titik pantau penilaian Adipura yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh	-	50	100000000	50	200000000	50	200000000	50	200000000	50	200000000	250	900,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		75%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	150.000.000	90%	150.000.000	95%	150.000.000	95%	750,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah , lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10.201	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota		36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	180	750,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10.201.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	-	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	180	750,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di			1. Prosentase Sampah yang tertangani		91%	28,649,708,900	92%	66261780250	93%	82972265100	94%	68928789950	95%	67794314800	95%	314,606,859,000		Dinas Lingkungan Hidup

	Wilayah Kabupaten/Kota			2. Prosentase pengendalian limbah b3		100%	28,649,708,900	100%	66,261,780,250	100%	82,972,265,100	100%	68,928,789,950	100%	67,794,314,800	100%	314,606,859,000		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Sampah yang tertangani	100%	100%	28,649,708,900	100%	66,261,780,250	100%	82,972,265,100	100%	68,928,789,950	100%	67,794,314,800	100%	314,606,859,000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.201	Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah		70.76%		68.44%		64.83%		62.55%		62.55%					Dinas Lingkungan Hidup	
				Prosentase Pengurangan Sampah		24.05%	28,649,708,900	26.11%	66,261,780,250	27.69%	82,972,265,100	29.64%	68,928,789,950	32.00%	67,794,314,800	32%	314,606,859,000		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.201.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		1	50,000,000								1	50,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.11.201.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah bank Sampah	249	2	10,000,000	62	310,000,000	62	310,000,000	61	305,000,000	61	305,000,000	248	1,240,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Kelompok Peduli Sampah			-	35	1,750,000,000	35	1,750,000,000	36	1,800,000,000	36	1,800,000,000	36	1,800,000,000	36	1,800,000,000	178	8,900,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Lokasi Pengelolaan Sampah di Hulu			-	10		25		20		15		9						Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Pengadaan Prasarana			-	18	2,139,873,500	25	5,000,000,000	20	4,000,000,000	15	3,000,000,000	9	1,800,000,000	87	15,939,873,500			Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

				Pengelolaan Sampah (PSD)																
		2.11.11.2 01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPST yang terbangun	80	9	1,800,000,000	25	5,000,000,000	20	4,000,000,000	15	3,000,000,000	10	2,000,000,000	79	15,800,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Timbulan sampah (ton/jiwa/tahun)	65.581,74	65.382		65.282		65.182		65.082		64.982					Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah Petugas Kebersihan		306	5,508,000,000	606	11,968,500,000	906	17,893,500,000	1206	23,818,500,000	1550	30,612,500,000	4574	89,801,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Liter Bahan Bakar dan Pelumas		332,596	3,715,315,400	365,855	4,086,840,250	399,114	4,458,365,100	432,373	4,829,889,950	465,632	5,201,414,800		22,291,825,500	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah M3 Tanah Urug TPA		2,600	315,900,000	3,600	437,400,000	3,600	437,400,000	3,600	437,400,000	3,600	437,400,000	17,000	2,065,500,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah M3 Paving Blok TPA		2200	202620000	2400	221040000	0		0		0		4600	423,660,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Pemeliharaan Alat Angkut		1	405000000	1	405000000	1	405000000	1	405000000	1	405000000	5	2,025,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Pemeliharaan Alat Berat Darat		1	400000000	1	500000000	1	600000000	1	700000000	1	800000000	5	3,000,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Cetak Kupon BBM dan Retribusi		1	330000000	1	330000000	1	330000000	1	330000000	1	330000000	5	165,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	

				Jumlah Persentase Penanganan Sampah	88%	80%	6,160,000,000	80%	18,275,000,000	80%	24,517,500,000	80%	15,300,000,000	80%	12,200,000,000	80%	76,452,500,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2 01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah dengan bentuk pemilahan sampah	249	2	10,000,000	62	310,000,000	62	310,000,000	61	305,000,000	61	305,000,000	248	1,240,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah	249	2	50,000,000	62	1,550,000,000	62	1,550,000,000	61	1,525,000,000	61	1,525,000,000	248	6,200,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2 01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah instalasi pengelolaan sampah di TPA yang terbangun	1	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	10	1,250,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah pengadaan Alat Berat Besar Darat	-	1 Unit	1,700,000,000	1 Unit	1,700,000,000	1 Unit	1,700,000,000	1 Unit	1,700,000,000	1 Unit	1,700,000,000	5	8,500,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah pengadaan Kendaraan Roda 3 Bermotor		55 Unit	250,000,000	56 Unit	2,800,000,000	56 Unit	2,800,000,000	55 Unit	2,750,000,000	55 Unit	2,750,000,000	277	11,350,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah pengadaan Armada Angkutan Sampah	-	10 Unit	1,000,000,000	15 Unit	1,500,000,000	20 Unit	2,000,000,000	10 unit	1,000,000,000	10 Unit	1,000,000,000	65	6,500,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah Pengadaan Gerobak	-	64	200,000,000	64	250,000,000	64	300,000,000	64	350,000,000	64	400,000,000	320	1,500,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah pengadaan Armada Angkutan Sampah Alat Berat	-	0	-	3	4,200,000,000	2	10,600,000,000	1	2,600,000,000	0	0	6	17,400,000,000	Seksi Pengelolan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

				Pemeliharaan TPS		20	650,000,000	22	715,000,000	31	1,007,500,000	56	1,820,000,000	76	2,470,000,000	205	6,662,500,000	Seksi Pengelola an Sampah	Dinas Lingkung an Hidup
				Pembangunan TPS		10	2,000,000,000	25	5,000,000,000	20	4,000,000,000	15	3,000,000,000	9	1,800,000,000	79	15,800,000,000	Seksi Pengelola an Sampah	Dinas Lingkung an Hidup
<b>Sesudah Perubahan</b>																			
Meningka tnya kualitas pengelola an keuangan dan aset daerah yang profesio nal, efektif, dan efisien.				Nilai SAKIP OPD	-	70	18,654,018,328	72	16,847,338,328	74	16,786,618,328	76	16,769,018,328	78	16,705,525,328	78	85,762,518,640	Kepala Dinas	Dinas Lingkung an Hidup
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Indikator Program yang tercapai	100%		18,654,018,328	100%	16,847,338,328	100%	16,786,618,328	100%	16,769,018,328	100%	16,705,525,328	100%	85,762,518,640	Kepala Dinas	Dinas Lingkung an Hidup

		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	100%	100%	18,654,018,328	100%	16,847,338,328	100%	16,786,618,328	100%	16,769,018,328	100%	16,705,525,328	100%	85,762,518,640	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun	6 Dok	6 Dok	165,000,000	6 Dok	165000000	6 Dok	165000000	6 Dok	165000000	6 Dok	165000000	30 Dok	825,000,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	5 Dokumen	175,000,000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	5 Dok	100,000,000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	5 Dokumen	75,000,000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dokumen	35000000	1 Dokumen	35000000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	5 Dokumen	175,000,000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup

				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														dan Keuangan	
		2.11.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	150000000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	5 Laporan	150000000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		1 laporan	14,493,925,328	1 laporan	14,493,925,328	1 laporan	14,493,925,328	1 laporan	14,493,925,328	1 laporan	14,493,925,328	laporan	72,469,626,640	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan x 281 Orang	280 Orang	14,457,925,328	243 Orang	14,457,925,328	245 Orang	14,457,925,328	247 Orang	14,457,925,328	249 Orang	14,457,925,328	1264 Orang	72,289,626,640	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik		250 Dokumen	16,000,000	260 Dokumen	16,000,000.00	270 Dokumen	16,000,000.00	280 Dokumen	16,000,000.00	290 Dokumen	16,000,000.00	1350 Dokumen	80,000,000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup

			asi Keuangan SKPD	asi Keuangan SKPD														dan Keuangan	
		2.11.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	5 Laporan	100,000,000	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	5 Laporan	50,000,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	5 Laporan	50,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		524 dok	388,500,000	487 dok	388,500,000	491 dok	393,500,000	495 dok	451,100,000	499 dok	451,100,000	2496 dok	2,072,700,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	280 Paket	230,400,000	243 paket	230,400,000	245 Paket	230,400,000	247 Paket	288,000,000	249 Paket	288,000,000	1264 paket	1,267,200,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	5 Dok	165,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.01.2 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	243 dok	28,100,00 0	243 dok	28,100,00 0	245 dok	28,100,00 0	247 dok	28,100,00 0	249 dok	28,100,00 0	1227 dok	140,500,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawa ian	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	2 Orang	100,000,0 00	4 Orang	100,000,0 00	6 Orang	100,000,0 00	8 Orang	100,000,0 00	10 Orang	100,000,0 00	30 Orang	500000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa ian	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 06	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		464	634,000,0 00	464	634,000,0 00	464	637,000,0 00	464	663,500,0 00	464	693,500,0 00	2320	3,262,000,0 00	Sekretari s Dinas	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	7,000,000	12 Paket	7,000,000	12 Paket	7,000,000	12 Paket	8,500,000	12 Paket	8,500,000	60 Paket	38000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa ian	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	98,000,00 0	3 paket	98,000,00 0	3 paket	98,000,00 0	3 paket	10000000 0	3 paket	10000000 0	15 Paket	494000000 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawa ian	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	12,000,00 0	12 Paket	12,000,00 0	12 Paket	12,000,00 0	12 Paket	15,000,00 0	12 Paket	15,000,00 0	60 Paket	66000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawa ian	Dinas Lingkun gan Hidup
		2.11.01.2 06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik		36 Paket	36,000,00 0	36 Paket	36,000,00 0	36 Paket	36,000,00 0	36 Paket	36,000,00 0	36 Paket	36,000,00 0	180 Paket	180000000	Sub Bagian Umum	Dinas Lingkun

			Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan														dan Kepegawaian	gan Hidup
		2.11.01.2 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		24 paket	16,000,000	24 paket	16,000,000	24 paket	16,000,000	24 paket	16,000,000	24 paket	16,000,000	120 Paket	80000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		5 dokumen	15,000,000	5 dokumen	15,000,000	5 dokumen	18,000,000	5 dokumen	18,000,000	5 dokumen	18,000,000	25 Dokumen	84000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		372 Laporan	450,000,000.00	372 Laporan	450,000,000	372 Laporan	450,000,000	372 Laporan	470,000,000	372 Laporan	500,000,000	1860 Laporan	2320000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10	35,000,000	19	535,000,000	19	735,000,000	19	785,000,000	19	885,000,000	86	2,975,000,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	35,000,000	18 Unit	35,000,000	18 Unit	35,000,000	18 Unit	35,000,000	18 Unit	35,000,000	82 Unit	1750000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	0 unit	-	1 unit	500,000,000	1 unit	700,000,000	1 unit	750,000,000	1 unit	850,000,000	4 unit	2800,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup

				Lainnya yang Disediakan															
		2.11.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 laporan	2,611,600,000	36 laporan	15,700,000	36 laporan	16,200,000	36 laporan	19,500,000	36 laporan	22,500,000	180 laporan	2,685,500,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2,600,000,000	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	3,500,000	60 Laporan	2,613,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1,000,000	12 Laporan	1,200,000	12 Laporan	1,200,000	12 Laporan	1,500,000	12 Laporan	2,000,000	60 Laporan	6900,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	10,600,000	12 Laporan	11,500,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	14,500,000	12 Laporan	17,000,000	60 Laporan	65,600,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		181	315,993,000	190	605,213,000	200	335,993,000	205	345,993,000	210	355,993,000	986	1,959,185,000	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas /	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12	12	10,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	60	100000000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup

			Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya															
		2.11.01.2 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		112 Unit	225,993,0 00	112 Unit	225,993,0 00	112 Unit	225,993,0 00	112 Unit	225,993,0 00	112 Unit	225,993,0 00	560 Unit	1,129,965,0 00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	15 Unit	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		51 Unit	30,000,00 0	60 Unit	35,000,00 0	70 Unit	40,000,00 0	75 Unit	45,000,00 0	80 Unit	50,000,00 0	336 Unit	200,000,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50,000,00 0	1 Unit	50,000,00 0	1 Unit	50,000,00 0	1 Unit	50,000,00 0	1 Unit	50,000,00 0	5 Unit	250,000,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0	1 Unit	139,610,0 00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	5 unit	139,610,00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.01.2 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana		1 Unit	0	1 Unit	139,610,0 00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	5 Unit	139,610,00 0	Sub Bagian	Dinas Lingkungan

			dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														Umum dan Kepegawaian	gan Hidup
Meningkatnya sinergitata kelola lingkungan hidup yang berkualitas				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.08			63,29	21,036,000,00	63,55	24,602,000,00	63,81	26,735,000,00	64,07	28,826,000,00			Kepala dinas	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	3,400,000,000		Kepala dinas	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan Hidup yang dibuat	0		100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	3,400,000,000		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.201	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup			2 dok	425,000,000	3 dok	425,000,000	2 dok	425,000,000	2 dok	425,000,000	9 dok	1,700,000,000		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.201.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			2	425,000,000	3	425,000,000	2	425,000,000	2	425,000,000	9	1,700,000,000		Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.202	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian			8	425,000,000	9	425,000,000	8	425,000,000	9	425,000,000	34	1,700,000,000		Bidang Tata	Dinas Lingkungan

			Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)													Lingkungan	gan
		2.11.02.2 02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		7	141,666,000	7	141,666,000	7	141,666,000	7	141,666,000	28	566,664,000	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2 02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			0	141,666,000	1	141,666,000	0	141,666,000	1	141,666,000	2	566,664,000	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2 02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun			1	141,668,000	1	141,668,000	1	141,668,000	1	141,668,000	4	566,672,000	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan			Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			0,141	947,000,000	0,142	2,472,000,000	0,143	2,593,000,000	0,144	2,608,000,000	0,144	8,620,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Prosentase pengendalian pencemaran dan/atau			100%	947,000,000	100%	2,472,000,000	100%	2,593,000,000	100%	2,608,000,000	100%	8,620,000,000	Bidang Pengendalian Pencemar	Dinas Lingkungan Hidup

			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	kerusakan lingkungan hidup														an dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.201	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase titik pemantauan kualitas lingkungan			100%	210,400,000	100%	549,400,000	100%	576,200,000	100%	579,534,000	100%	1,915,534,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
				Prosentase kelurahan/desa yang mengikuti Program Kampung Iklim pada tahun berjalan			100%	105,200,000	100%	274,600,000	100%	288,100,000	100 %	289,766,000	100 %	957,666,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1	105,200,000	1	274,600,000	1	288,100,000	1	289,766,000	4	957,666,000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.201.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas			1	105,200,000	2	274,600,000	2	288,100,000	2	289,766,000	7	957,666,000	Bidang Pengendalian Pencemaran	Dinas Lingkungan Hidup	

			Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan														an dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.201.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			140	105,200,000	280	274,800,000	280	288,100,000	560	289,768,000	1260	957,868,000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.202	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Lingkungan			2	315,600,000	2	824,000,000	2	864,300,000	2	869,300,000	8	2,873,200,000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.202.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2	315,600,000	2	824,000,000	2	864,300,000	2	869,300,000	8	2,873,200,000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.03.203	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daerah yang dilakukan kegiatan rehabilitasi				1	315,800,00	1	824,000,00	2	864,400,00	2	869,400,00	6	2,873,600,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.203.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1	315,800,00	1	824,000,00	2	864,400,00	2	869,400,00	6	2,873,600,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota			Prosentase pengendalian limbah b3				100%	89000000	100%	105000000	100%	117000000	100%	168000000	100%	479,000,000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Pengendalian Limbah B3	0%			100%	89000000	100%	105000000	100%	117000000	100%	168000000	100%	479000000	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.201	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3				45	89000000	45	105000000	45	117000000	45	168000000	180	479000000	Bidang Pengelolaan	Dinas Lingkungan

																		Sampah dan Limbah B3	gan Hidup
		2.11.05.2 01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan			45	89,000,00	45	105,000,00	45	11700000	45	16800000	180	479000000		Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			100%	10000000	100%	10000000	100%	10000000	100%	10000000	100%	400,000,00		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	100%		100%	100,000,00	100%	100,000,00	100%	100,000,00	100%	10000000	100%	400,000,00		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2 01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			22	100,000,00	22	100,000,00	22	100,000,00	22	10000000	88	400,000,00			Dinas Lingkungan Hidup

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota														
		2.11.06.201.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			22	100,000,000	22	100,000,000	22	100,000,000	22	100000000	88	400,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			80%	100,000,000	85%	100,000,000	90%	100,000,000	95%	100,000,000	95%	400,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT	Prosentase Lembaga Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0		2%	100,000,000	2%	100,000,000	2%	100,000,000	2%	100,000,000	8 %	400,000,000	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08.201	Penyelenggaraan Pendidikan,	Jumlah lembaga kemasyarakatan			10	100,000,000	12	100,000,000	15	100,000,000	20	100,000,000	57	400,000,000	Bidang Tata	Dinas Lingkungan

			Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang diberi diklat / bimtek/ penyuluhan lingkungan hidup														Lingkungan	gan Hidup
		2.11.08.201.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			10	100,000,000	12	100,000,000	15	100,000,000	20	100,000,000	57	400,000,000		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			80%	800,000,000	80%	825,000,000	80%	825,000,000	80%	850,000,000	80%	3,300,000,000			Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih			80%	800,000,000	80%	825,000,000	80%	825,000,000	80%	850,000,000	80%	3,300,000,000		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09.201	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan			10	800,000,000	12	825,000,000	15	825,000,000	20	850,000,000	57	3,300,000,000		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah Desa yang diusulkan sebagai desa berseri			4	800,000,000	5	825,000,000	6	825,000,000	7	850,000,000	22	3,300,000,000		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09.201.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Duni	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Duni			95	800,000,000	110	825000000	122	825000000	140	850000000	467	3,300,000,000		Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

			a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH															
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			80%	15000000 0	85%	15000000 0	90%	15000000 0	95%	15000000 0	95%	600,000,00 0	Bidang Tata Lingkun gan	Dinas Lingkun gan Hidup	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah , lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani	100%		100%	15000000 0	100%	15000000 0	100%	15000000 0	100%	15000000 0	100%	600,000,00 0	Bidang Tata Lingkun gan	Dinas Lingkun gan Hidup	
		2.11.10.2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota			12	150,000,0 00	12	15000000 0	12	15000000 0	12	15000000 0	48	600,000,00 0		Dinas Lingkun gan Hidup	
		2.11.10.2 01.01	Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Pengaduan			12	150,000,0 00	12	150,000,0 00	12	15000000 0	12	15000000 0	48	600,000,00 0	Bidang Tata	Dinas Lingkun	

			Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani														Lingkungan	gan Hidup
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota			Prosentase Wilayah Sampah yang tertangani			77,41	18,000,000,000	77,41	20,000,000,000	80,65	22,000,000,000	80,65	24,000,000,000	80,65	84,000,000,000		Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Sampah yang tertangani	88%		90%	18,000,000,000	90%	20,000,000,000	90%	22,000,000,000	90%	24,000,000,000	90%	84,000,000,000		Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.201	Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah			72%	14,640,000,000	71%	16,133,333,000	70%	17,600,000,000	70%	19,200,000,000	70%	67,573,333,000		Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
				Prosentase Pengurangan Sampah			27%	3,360,000,000	28%	3,866,667,000	29%	4,400,000,000	30%	4,800,000,000	30%	16,426,667,000		Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.201.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali			1	6,480,000,000	1	7,100,000,000	1	7,700,000,000	1	8,400,000,000	4	28,680,000,000		Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

		2.11.11.2 01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			315	1,680,000,000	315	1,933,333,000	315	2,200,000,000	315	2,400,000,000	1260	8,213,333,000	Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2 01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			70	6,480,000,000	80	7,100,000,000	90	7,700,000,000	100	8,400,000,000	340	29,680,000,000	Seksi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2 01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			34	1,680,000,000	35	1,933,334,000	36	2,200,000,000	37	2,400,000,000	142	8,213,334,000	Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Dinas Lingkungan Hidup

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Sebelum Perubahan									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	75,08	62,78	63,03					
2	a. Indeks Kualitas Air (Indeks)	67,78	53,39	53,49					
	b. Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,57	77,11	77,20					
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	77,46	52,38	53,21					
3	a. Prosentase Sampah yang tertangani (%)	90,36	90,46	90,56					
Setelah Perubahan									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	75,08			63,29	63,55	63,81	64,07	64,07
2	d. Indeks Kualitas Air (Indeks)	67,78			52,25	52,35	52,45	52,55	52,55
	e. Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,57			71,75	71,85	71,95	72,05	72,05
	f. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	77,46			68,46	68,56	68,66	68,66	68,66
3	Prosentase dokumen perencanaan	0			100	100	100	100	100

	lingkungan hidup yang dibuat								
4	Prosentase pengendalian Limbah B3	0			100	100	100	100	100
5	Prosentase Binwas Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah	100			100	100	100	100	100
6	Prosentase Lembaga masyarakat bidang lingkungan hidup yang diberikan peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	0			2	2	2	2	2
7	Prosentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diraih	0			80	80	80	80	80
8	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izn PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani	100			100	100	100	100	100
9	Prosentase Sampah yang tertangani	88			90	90	90	90	90

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember,       Maret 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jember



**drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si**

Pembina Tk. 1

NIP. 198010272006041014